

Inovasi dalam Proses Operasional Kantor Konsultan Pajak: Penerapan Matriks Pengendalian Transaksi sebagai Strategi Preventif Kesalahan Pelaporan

Sabrina Aulia Istiqfarah^{1*}, Ajeng Tita Nawangsari²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Surabaya, Indonesia

Email: sabrinaistiq13@gmail.com¹, ajeng.tita@uinsa.ac.id²

*Penulis Korespondensi: sabrinaistiq13@gmail.com

Abstract: This study aims to implement the Transaction Control Matrix as an operational process innovation to prevent financial and tax reporting violations at Tax Consultant Offices (KKP). The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study approach, through in-depth interviews and direct observation of the report preparation process. The results indicate that the control matrix functions as an effective preventive instrument through a systematic reconciliation mechanism between bank statements and transaction documents, thus enabling early detection of discrepancies such as fictitious invoices or recording errors. In addition to improving the accuracy of Periodic VAT Tax Return reporting, this matrix also has multifunctional value as an accounting management tool, increasing audit efficiency, and providing a source of analytical data for clients. Implementation of the matrix strengthens the COSO Framework-based internal control system and transforms the KKP's role from a compliance service provider to a strategic partner. This study recommends the Transaction Control Matrix as a best practice for continuously improving the quality of KKP services.

Keywords: Fraud Prevention; Internal Control System; Reporting Errors; Tax Consultant Office; Transaction Control Matrix.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Matriks Kontrol Transaksi sebagai inovasi proses operasional untuk mencegah pelanggaran pelaporan keuangan dan pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa matriks kontrol berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif melalui mekanisme rekonsiliasi sistematis antara laporan bank dan dokumen transaksi, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap perbedaan seperti faktur fiktif atau kesalahan pencatatan. Selain meningkatkan akurasi pelaporan SPT PPN, matriks ini juga memiliki nilai multifungsi sebagai alat manajemen akuntansi, meningkatkan efisiensi audit, dan menyediakan sumber data analitis bagi klien. Implementasi matriks memperkuat sistem pengendalian internal berbasis Kerangka Kerja COSO dan mentransformasikan peran KKP dari penyedia layanan kepatuhan menjadi mitra strategis. Penelitian ini merekomendasikan Matriks Kontrol Transaksi sebagai praktik terbaik untuk terus meningkatkan kualitas layanan KKP.

Kata kunci: Kantor Konsultan Pajak; Matriks Kontrol Transaksi; Pelaporan Kesalahan; Pencegahan Kecurangan; Sistem Kontrol Internal.

1. PENDAHULUAN

Keakuratan pelaporan laporan keuangan merupakan pilar utama profesionalitas Kantor Konsultan Pajak (KKP) dalam melayani klien. Laporan keuangan yang akurat tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tapi juga membangun kepercayaan antara KKP dan stakeholder, termasuk otoritas pajak dan pemangku kepentingan klien. Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan benar dan bebas dari kesalahan material. Penelitian oleh (Arisandi, A dkk., 2022) menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengungkapan pengendalian internal (Internal Control Disclosure Index) memiliki hubungan signifikan dengan kualitas pelaporan keuangan di sektor perbankan Indonesia. Kantor Konsultan Pajak Dodit Priyanto Nugroho adalah sebuah

perusahaan jasa konsultan pajak yang berfokus pada memberikan solusi terbaik di bidang perpajakan dan akuntansi dengan motto High Integrity & High Competency. Didirikan oleh Bapak Dodit Priyanto Nugroho pada tahun 2015, kantor ini telah berkomitmen untuk memberikan layanan profesional dengan standar tinggi,

Namun, dalam praktiknya, KKP sering menghadapi hambatan signifikan dari klien yang enggan mengungkapkan seluruh transaksi secara transparan. Situasi ini memicu risiko munculnya laporan yang tidak akurat, entah melalui ketidaksengajaan atau manipulasi. Sistem pengendalian internal belum tentu efektif jika diuji dalam kondisi di mana data utama tidak diajukan secara utuh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Supriyanto, 2024) yang menunjukkan bahwa walau kualitas audit dan internal control over financial reporting (ICoFR) dapat mendeteksi fraud dan ketidakpatuhan, efektivitasnya menurun ketika data asal tidak sepenuhnya tersedia. Selain itu, fenomena faktur fiktif dan fraud semakin mengancam integritas pelaporan. permasalahan umum yang sering terjadi di lapangan salah satunya adalah ketidaksesuaian antara data pelaporan pajak dengan realisasi transaksi keuangan klien. seperti ditemukannya faktur pajak yang tidak berdasar pada transaksi penjualan atau pembelian, dimana faktur tersebut tidak memiliki dukungan mutasi kas atau bukti pembayaran aktual. Ketika kesalahan ini tidak terdeteksi sejak awal, risiko koreksi pajak, pemeriksaan pajak, hingga sanksi administratif, bahkan kerugian reputasi menjadi tanggungan pihak konsultan (Tampubolon, 2019). Situasi ini menimbulkan beban tambahan bagi Kantor Konsultan pajak, karena meskipun sumber kesalahan berasal dari klien, namun tanggung jawab profesional tetap melekat pada konsultan sebagai pihak penyusun laporan. Sehingga pada praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi. Auditor internal berperan penting dalam memitigasi kemungkinan manipulasi dan penyajian laporan yang menyimpang. Penelitian kualitatif di PT Asabri (Persero) oleh (Haryani dkk., 2023) menyoroti bagaimana auditor internal dapat menjadi garda pertama dalam menjaga kualitas pelaporan, termasuk mencegah manipulasi data finansial. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak bagi inovasi yang lebih sistematis dalam proses operasional KKP, terutama dengan penerapan alat pengendalian seperti matriks pengendalian transaksi.

Akurasi laporan keuangan tidak hanya menjadi tolok ukur profesionalitas KKP, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepatuhan pajak, pengambilan keputusan manajemen, serta keberlanjutan bisnis klien (Arafah, 2022). Tantangan berupa ketidakterbukaan data transaksi hingga praktik faktur fiktif menuntut adanya strategi inovatif yang tidak sekadar reaktif, melainkan preventif. Hingga saat ini, penelitian mengenai pengendalian internal dalam konteks KKP masih relatif terbatas dan lebih banyak berfokus pada sektor korporasi besar. Oleh sebab itu, penerapan matriks pengendalian sebagai strategi operasional KKP menjadi

relevan untuk diteliti, karena dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur akuntansi sekaligus manfaat praktis bagi konsultan pajak dalam meningkatkan efektivitas layanan, mencegah kesalahan pelaporan, dan memperkuat kredibilitas di mata klien maupun otoritas pajak.

2. LANDASAN TEORI

Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Kantor Konsultan Pajak adalah organisasi atau lembaga yang menyediakan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. KKP bertugas membantu klien dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak serta perencanaan pajak. KKP berfungsi sebagai mitra wajib pajak dalam memastikan bahwa pelaporan pajak dan laporan keuangan yang diserahkan ke otoritas pajak akurat, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku. KKP melakukan pemeriksaan dokumen transaksi, melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan laporan pajak, serta memberikan bimbingan dalam mengelola risiko pajak. KKP juga membantu dalam tax planning, tax review, dan audit pajak agar perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya tanpa melanggar aturan. Keakuratan pelaporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena laporan keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kewajiban perpajakan dan berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah. Kantor Konsultan Pajak memiliki sistem pengendalian mutu dan metodologi khusus (seperti Risk Based Management Approach) dalam membantu klien menghasilkan laporan keuangan dan pajak yang benar dan sesuai ketentuan. Dengan menggunakan jasa KKP, risiko kesalahan pelaporan dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat lebih tenang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Akurasi dan kualitas laporan keuangan

Akurasi dan kualitas laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan secara transparan sehingga mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas secara akurat (Suwardjono, 2016). Laporan keuangan yang berkualitas harus bebas dari kesalahan material serta disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang disajikan dapat dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif (Dariana & Oktavia, 2018). Selain itu,

kualitas laporan keuangan juga mencakup aspek relevansi dan keandalan informasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan para pengguna laporan, seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan (JIIC Nusantara, 2024). Selain itu, (Fathurochman, 2016) menekankan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam proses pelaporan. Dalam konteks Kantor Konsultan Pajak (KKP), penerapan mekanisme pengendalian yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan akurasi dan kualitas laporan keuangan yang disusun bagi klien mereka.

Risiko Kesalahan dan Fraud dalam Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan dan perpajakan merupakan output kritis dari sebuah kantor konsultan pajak (KKP) yang menentukan kualitas layanan dan tingkat kepercayaan klien. Namun, proses penyusunannya rentan terhadap dua jenis anomaly utama, yaitu kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). Secara teoretis, kesalahan (error) merupakan ketidakakuratan yang tidak disengaja dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kelalaian manusia (human error), kesalahan penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau ketentuan perpajakan, kelemahan dalam sistem verifikasi data, atau rutinitas operasional yang tidak terstandarisasi (Siregar & Tanoyo, 2015). Dalam konteks KKP, error dapat berupa kesalahan hitung, kelalaian menginput data, salah penafsiran terhadap tax treaty, atau missed deadline yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi klien serta merusak reputasi KKP.

Di sisi lain, kecurangan (fraud) didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan satu pihak tertentu, yang seringkali melibatkan manipulasi catatan, penggelapan aset, atau penyajian laporan yang menyesatkan (Arens dkk., 2020). Fenomena fraud dalam KKP dapat dianalisis melalui lensa Fraud Diamond Theory yang diperkenalkan oleh (Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R, 2004). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan tidak hanya memerlukan tiga elemen klasik dari Fraud Triangle (pressure, opportunity, rationalization), tetapi juga capability (kemampuan/keahlian individu untuk melaksanakan rencana kecurangan). Seorang konsultan pajak yang memiliki kemampuan teknis tinggi (capability) dan didorong oleh tekanan finansial (pressure) untuk mempertahankan klien atau mendapatkan bonus, dapat memanfaatkan celah dalam pengendalian internal yang lemah (opportunity) dan membenarkan tindakannya (rationalization) dengan dalih membantu klien. Risiko fraud di KKP sangat nyata, mulai dari penggelapan pajak klien yang dibayarkan ke negara, markup biaya, hingga kolusi dengan fiskus untuk menguntungkan pihak tertentu (Oktaviani & Tambunan, 2021).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tiga tujuan utama, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2013). Dalam konteks Kantor Konsultan Pajak (KKP), keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum menjadi tujuan yang paling krusial, mengingat output utama jasa mereka adalah laporan keuangan dan SPT Pajak yang akurat dan memenuhi prinsip wajib pajak yang baik. Efektivitas suatu SPI sangat bergantung pada lima komponen yang saling berkaitan, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian yang menetapkan nada integritas dan etika organisasi; (2) Proses Penilaian Risiko untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan; (3) Aktivitas Pengendalian yang berupa kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen dilaksanakan; (4) Informasi dan Komunikasi yang memastikan aliran informasi yang diperlukan berjalan efektif; serta (5) Kegiatan Pemantauan yang mengevaluasi kualitas kinerja SPI dari waktu ke waktu (Zahura & Hamdani, 2025).

Matriks Pengendalian Transaksi

Sebagai implementasi teknis dari aktivitas pengendalian (control activities) dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), Matriks Pengendalian Transaksi berperan sebagai instrumen kunci yang menjembatani prinsip teori dengan praktik operasional. Matriks ini merupakan sebuah kertas kerja (working paper) yang dirancang khusus oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) untuk memetakan, memantau, dan mengendalikan seluruh alur transaksi dan pelaporan yang kritis. Fungsinya yang utama adalah sebagai alat kontrol preventif yang dirancang untuk mengekualkan (reconcile) antara pajak yang dilaporkan (seperti dalam Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT) dengan mutasi kas atau bank secara sistematis dan terjadwal (Basuki, 2024). Dengan melakukan rekonsiliasi dan penelusuran (tracing) yang terstruktur ini, setiap ketidaksesuaian, seperti faktur pajak masukan fiktif, transaksi yang tidak tercatat, atau kesalahan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat diidentifikasi lebih dini sebelum laporan pajak disampaikan kepada otoritas. Hal ini sejalan dengan penelitian (Febrianto & Fitriana, 2020) yang menekankan bahwa pengendalian detektif dan preventif yang terstruktur secara dokumentatif signifikan dalam meminimalkan risk of material misstatement baik akibat kekeliruan (error) maupun kecurangan (fraud).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak (KKP). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konsultan pajak dan staf penyusun laporan keuangan yang terlibat langsung dalam proses operasional KKP. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keakuratan pelaporan, serta strategi preventif yang digunakan dalam menjaga keakuratan laporan keuangan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan mekanisme pengendalian yang diterapkan di KKP. Observasi ini memungkinkan peneliti memahami alur kerja secara nyata, mengidentifikasi titik rawan kesalahan, serta melihat praktik pengendalian internal yang telah dijalankan. Kombinasi wawancara dan observasi diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan dan memperkuat validitas hasil peneliti

4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan implementasi yang diteliti, strategi inovatif Kantor Konsultan Pajak (KKP) dalam mempertahankan keakuratan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan perpajakan klien dilakukan melalui penerapan Matriks Pengendalian Transaksi sebagai instrumen kontrol operasional inti. Kertas kerja yang dirancang khusus ini berfungsi sebagai kerangka kerja (framework) prosedural yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pengendalian internal preventif ke dalam aktivitas harian penyusunan laporan. Implementasi ini secara khusus difokuskan pada akun penjualan dan pembelian, akun yang tidak hanya material bagi laporan keuangan tetapi juga menjadi dasar penghitungan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam SPT Masa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban setiap karyawan untuk menjalankan prosedur dalam matriks ini sebelum menyusun laporan telah menciptakan suatu mekanisme quality assurance yang terstruktur dan terdokumentasi.

INVOICE PENJUALAN			FATUR PAJAK			MUTASI BANK			KETERANGAN
TANGGAL	NAMA TOKO	JUMLAH	TANGGAL	NAMA TOKO	JUMLAH	TANGGAL	NAMA TRANSAKSI	JUMLAH	
13/01/2025	PT MENUA BERSAMA	2.000.000	13/01/2025	PT MENUA BERSAMA	2.000.000	14/01/2025	PT MENUA BERSAMA	2.000.000	LUNAS
17/01/2025	PT MAJU MUNDUR	3.000.000	17/01/2025	PT MAJU MUNDUR	3.000.000	26/01/2025	PT MAJU MUNDUR	1.500.000	BELUM LUNAS

Gambar 1 Kertas kerja matriks pengendalian transaksi.

Kertas kerja Matriks Pengendalian Transaksi dijalankan melalui suatu alur kerja yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan pelaporan. Alur kerja ini dimulai dengan pengumpulan data sumber dari dua channel utama: (1) laporan mutasi bank dari periode pelaporan yang relevan, dan (2) dokumen pendukung transaksi seperti faktur pajak keluar (untuk penjualan), faktur pajak masukan (untuk pembelian), serta bukti-bukti transaksi

lainnya. Data ini kemudian diinput dan dikategorikan ke dalam matriks yang telah dirancang, biasanya dalam format spreadsheet, yang memuat kolom-kolom kritikal seperti tanggal transaksi, deskripsi, nominal di mutasi bank, nominal di faktur pajak, keterangan (lunas/kredit), dan status verifikasi.

Tahap inti dari alur ini adalah proses rekonsiliasi atau pengekualisasian, dimana staff dengan bantuan formula excel mencocokkan (matching) setiap transaksi yang tercatat di mutasi bank dengan faktur pajak yang tercatat dalam sistem pembukuan. Transaksi yang nilainya dan waktunya sesuai langsung ditandai sebagai "terrekonsiliasi" atau "lunas". Selanjutnya, untuk transaksi yang tidak match misalnya ada pembayaran di bank tetapi tidak ada faktur pajaknya, atau ada faktur pajak tetapi belum ada pembayarannya staff wajib melakukan eskalasi dan konfirmasi kepada klien untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen transaksi tersebut. Setelah semua selisih terkonfirmasi dan terselesaikan, matriks yang telah lengkap dan diverifikasi ini kemudian menjadi dasar penyusunan SPT Masa PPN dan laporan keuangan, sekaligus berfungsi sebagai audit trail yang lengkap untuk proses review oleh supervisor sebelum pelaporan akhir.

Matriks sebagai Mekanisme Rekonsiliasi dan Deteksi Dini

Strategi inti dari matriks ini adalah menjalankan fungsi rekonsiliasi sistematis antara dua sumber data kritis yaitu catatan mutasi bank/buku kas dan dokumen pendukung transaksi (faktur pajak keluar/masuk) yang menjadi dasar pelaporan SPT Masa PPN. Proses ini merupakan operasionalisasi dari konsep aktivitas pengendalian (control activities) yang diamanatkan dalam kerangka kerja COSO (2013), khususnya kegiatan reconciliations dan verifications. Penelitiannya mengungkap bahwa dalam praktiknya, matriks berfungsi sebagai early warning system. Ketika suatu transaksi penjualan tercatat dalam pembukuan tetapi tidak ditemukan penerimaan pembayarannya yang sesuai dalam mutasi bank dalam periode yang wajar, atau sebaliknya, suatu pembayaran dalam mutasi bank tidak dapat dicocokkan dengan faktur pembelian yang sah, matriks secara otomatis menyoroti selisih ini sebagai item yang memerlukan investigasi lebih lanjut.

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Basuki, 2024) yang menyatakan bahwa rekonsiliasi antara faktur pajak dan mutasi bank merupakan prosedur detektif yang paling efektif untuk mengidentifikasi indikasi potensi fraud atau kesalahan pencatatan di tahap awal. Dalam konteks KKP yang diteliti, prosedur standar yang berlaku mengharuskan staff untuk segera mengeskalasi dan mengonfirmasi setiap selisih yang teridentifikasi langsung kepada klien. Langkah konfirmasi ini bukan hanya untuk memverifikasi keabsahan transaksi tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip substance over form dan ketentuan

pembuatan faktur pajak sesuai Perdirjen Pajak. Dengan demikian, matriks tidak hanya mencegah human error (seperti kelalaian mencatat atau kesalahan nominal) tetapi juga secara signifikan mempersempit opportunity untuk terjadinya kecurangan, yang merupakan salah satu elemen dalam Fraud Diamond (Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R., 2004)

Multifungsi Matriks dari Kepatuhan hingga Manajemen Kas

Pembahasan yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa nilai strategis matriks pengendalian transaksi bersifat multifungsi (multi-purpose tool), melampaui tujuan utama kepatuhan PPN. Data yang terkumpul dan terverifikasi melalui proses rekonsiliasi matriks memberikan manfaat tambahan yang substansial bagi kedua belah pihak, KKP dan klien.

- a. Manajemen Piutang dan Utang: Matriks secara otomatis mengklasifikasikan status transaksi. Transaksi yang telah tercatat pembayarannya di mutasi bank dikategorikan sebagai "lunas", sementara yang belum dicatat pembayarannya tetap tercatat sebagai "piutang" atau "hutang" usaha. Kemampuan ini memberikan dashboard real-time mengenai posisi likuiditas klien terkait transaksi usaha utamanya. Bagi KKP, data ini sangat berharga untuk memberikan advice tambahan kepada klien mengenai manajemen keuangan, seperti pengingat untuk menagih piutang yang telah jatuh tempo atau mengatur ulang jatuh tempo utang (Sihombing, 2018).
- b. Efisiensi Audit dan Review: Proses kerja yang terdokumentasi dalam matriks menyediakan audit trail yang jelas dan kuat. Hal ini sangat meningkatkan efisiensi proses review oleh supervisor atau pemilik KKP sebelum laporan dan SPT disampaikan. Reviewer tidak perlu lagi menelusuri ulang seluruh transaksi dari awal, tetapi dapat fokus pada item-item yang telah ditandai atau yang memiliki catatan tertentu dalam matriks. Ini merupakan implementasi dari prinsip documentation yang baik dalam sebuah sistem pengendalian internal (COSO, 2013).
- c. Peningkatan Kualitas Data dan Analisis: Kumpulan data historis dari matriks yang telah dijalankan dari periode ke periode dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola transaksi, tren penjualan atau pembelian, serta potensi risiko yang berulang pada klien tertentu. Data yang telah terverifikasi akurasi ini menjadi dasar yang andal untuk penyusunan laporan keuangan komparatif dan untuk memberikan analisis bisnis yang lebih bernilai (value-added analysis) kepada klien.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Matriks Pengendalian Transaksi merupakan sebuah inovasi proses operasional yang efektif dan strategis bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP). Matriks yang berfungsi sebagai kertas kerja standar ini terbukti mampu menjadi strategi preventif yang tangguh dalam memitigasi risiko kesalahan (*error*) dan potensi kecurangan (*fraud*) pada proses pelaporan keuangan dan perpajakan, khususnya yang bersumber dari akun penjualan dan pembelian serta pelaporan SPT Masa PPN. Strategi inti matriks terletak pada mekanisme rekonsiliasi sistematis yang memaksa adanya pengecekan dan penyeimbangan (*check and balance*) antara data mutasi bank dan dokumen transaksi. Proses ini berhasil menciptakan *early detection system* yang memungkinkan kesalahan identifikasi dan selisih dapat ditemukan dan dikonfirmasi kepada klien pada tahap paling awal, sebelum laporan disusun. Hal ini secara signifikan meningkatkan akurasi dan keandalan laporan.

Matriks Pengendalian Transaksi juga berperan sebagai *beyond compliance*, matriks memiliki nilai multifungsi yang meningkatkan nilai tambah layanan KKP. Ia tidak hanya memastikan kepatuhan PPN tetapi juga secara otomatis memetakan status transaksi (lunas/kredit), menyediakan data real-time untuk konsultasi manajemen kas klien, menyederhanakan proses audit internal, dan membangun *audit trail* yang dokumentatif. Ini mentransformasi peran KKP dari penyedia jasa kepatuhan menjadi mitra strategis bagi klien. Penerapan matriks ini memperkuat seluruh lima komponen Sistem Pengendalian Internal (COSO, 2013). Ia menciptakan *control environment* yang lebih disiplin, merupakan bentuk konkret *risk assessment* dan *control activities*, memastikan *information and communication* yang jelas antara staff dan klien, serta memfasilitasi *monitoring activities* oleh supervisor melalui review terhadap kertas kerja yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan Matriks Pengendalian Transaksi untuk diadopsi sebagai *best practice* oleh KKP lainnya sebagai bagian dari modernisasi proses operasional dan peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, F. (2022). Analisis Peran Audit Internal Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Medan S. Parman) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/19122/>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). Auditing and Assurance Services, 17th Edition.
- Arisandi, A, Islami, H. A, & Soeprajitno, R. R. W. N. (2022). Internal control disclosure and financial reporting quality: Evidence from banking sector in Indonesia. E-Jurnal Akuntansi.
- Basuki, M. M. P. P. (2024). Analisis Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung dalam Pencegahan Kecurangan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Atas Dana Desa (Studi Kasus pada KPP Pratama Temanggung) [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49528>
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 2(1), 77–105.
- Fathurochman, T. A. (2016). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS PERENCANAAN AUDIT. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7719>
- Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2020). MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia). Jurnal Profita, 13(1), 85. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.007>
- Haryani, feni, Fitria Nasta'in, Ika Novitasari, Wahyu Marginingtyas Andika Putri, & Herlina Manurung. (2023). Internal Auditor's Responsibilities for Quality Control of Financial Reporting at PT Asabri (Persero): A Qualitative Analysis. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2152>
- Oktaviani, D. T., & Tambunan, M. R. U. D. (2021). The Implementation of Advance Pricing Agreement in Indonesia Following The Adoption of Dispute Resolution Guideline. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 27(2), 89–96. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11756>
- Siregar, & Tanoyo. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia | Journal of Financial Crime | Emerald Publishing. <https://www.emerald.com/jfc/article-abstract/22/3/329/217223/Fraud-awareness-survey-of-private-sector-in?redirectedFrom=fulltext>
- Supriyanto, B. S. Y. (2024). Pengaruh Kualitas Audit dan Internal Control over Financial Reporting terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Industri Konsumsi [Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/34201>
- Suwardjono. (2016). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.
- Tampubolon, M. N. H. (2019). Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan), 6(02), Article 02. <https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.02.18>

- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud" by David T. Wolfe and Dana R. Hermanson. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs/1537/>
- Zahura, D. A. T., & Hamdani, R. (2025). Analisis Efektivitas Pengendalian Internal dalam Proses Penjualan dan Penagihan Piutang: Studi Kasus pada Perusahaan Konsultan Jasa Akuntansi. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 3557–3569. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.6275>